



**RENJA (RENCANA KERJA) DINAS KESEHATAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

Judul :

**Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali
Mandar Tahun 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Hj. A. Depu No. 02 Polewali
Telp. (0428) 2410798, Fax (0428) 2410998, Kode Pos 91311
Website : <http://dinkes.polewalimandarkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 267.a / VII /2022/KES**

TENTANG

**RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

KEPALA KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Tahun 2019 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 dan demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi SKPD Dinas Kesehatan 2019-2023 yang termuat dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. Bahwa untuk menjabarkan Rencana Strategis OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 dan dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2022 perlu disusun Rencana Kerja 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tugas Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 tahun 2009 tentang Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032(Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 1);

12.Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar B-186.a/Dinkes/440/07/2019 tentang Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 202
- KESATU : Rencana Kerja 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini diterbitkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali

Pada Tanggal, 11 Juli 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Polewali Mandar,



H.M. Suaib Naywawi, SKM, M.Kes

NIP : 19630927 198311 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali bertujuan merumuskan kebijakan, strategi dan program-program jangka pendek (satu tahun) yang diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kondisi objektif dan perubahan dinamika lingkungan kerja.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2023 ini disadari masih belum sempurna karena berbagai kekurangan dan kelemahan, olehnya itu kami harapkan adanya masukan, saran dan kritikan untuk penyempurnaan di masa datang.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan apresiasi, masukan dan saran-saran atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini, dengan harapan dapat dijadikan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Polewali Mandar,



H.M. Suaib Nawawi, SKM, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19630927 198311 1001

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	50
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	51
3.3 Program dan Kegiatan	53
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	58
BAB V PENUTUP	83

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bidang pembangunan lainnya, misalnya pembangunan ekonomi, budaya dan infrastruktur, tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yaitu keadaan sehat, fisik-jasmani, mental, dan rohani-spiritual serta sosial bagi setiap orang agar dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk melihat derajat kesehatan dari hasil-hasil pembangunan kesehatan adalah adanya Rencana Kerja (Renja). Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan yang sudah tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 yang diharuskan pada program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD I dan APBN Tahun Anggaran 2023.

Rencana kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan Pelaksanaan Tahun Kelima dari Renstra 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar dan merupakan alat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan yang telah disepakati dalam Renstra dan dijadikan

acuan oleh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah cq Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan urutan dan skala prioritas setiap program khususnya tahun 2023, dimana dalam penyusunan Renja ini tetap mengacu kepada 4 agenda utama pembangunan dalam RPJMD Polewali Mandar yaitu : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan berdasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya; Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; Meningkatkan infrastruktur guna mendorong daya saing daerah; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai sasaran strategis utama ; Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang mandiri dan partisipatif, Optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit berbasis pola perkembangan penyakit, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kesehatan dasar, rujukan, dan penyelenggaraan kesehatan khusus, Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian serta sarana prasarana.

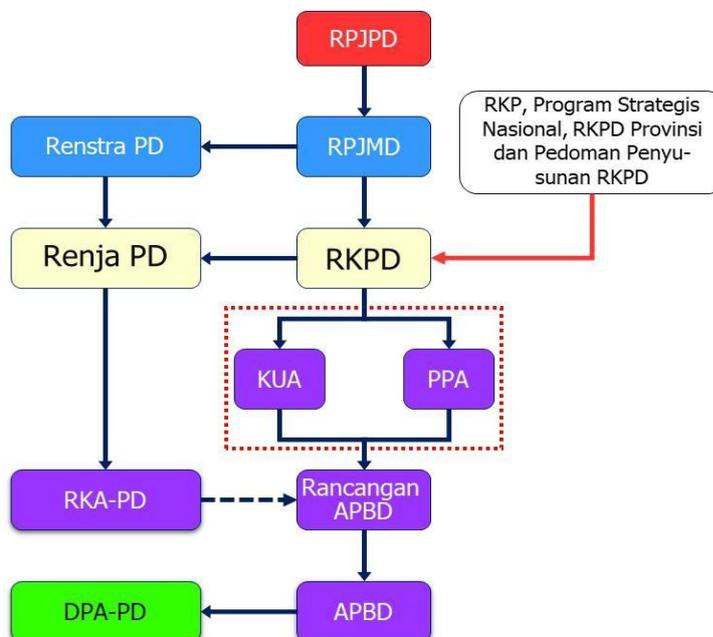
Untuk mencapai sasaran strategis ini, setiap tahunnya semua kegiatan dan program diarahkan kepada Kesatu : Peningkatan capaian standar pelayanan minimal kesehatan (SPM-Kesehatan) sampai dengan target yang ditetapkan. Kedua : Peningkatan status kesehatan agar masyarakat dapat hidup sehat, produktif secara social dan ekonomi, Ketiga : Pencapaian standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sampai dengan yang ditargetkan. Ke Empat : Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam usaha kesehatan bersumber daya masyarakat. Ke Lima : Peningkatan kualitas SDM-Kesehatan dan Ke enam : Peningkatan mutu manajemen administrasi bidang kesehatan.

Rencana Kerja Kesehatan tahun 2023 ini disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan dimulai dari Pembentukan Tim, Penyusunan Agenda Kerja dan persiapan data dan informasi
2. Penyusunan rancangan awal dengan berpedoman pada Renstra, Hasil evaluasi renja tahun lalu dan hasil evaluasi renja tahun berjalan. Proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKP
3. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; pembahasan rancangan Renja (target kinerja, sasaran, program

kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran) Usulan Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru (Diajukan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA dalam forum ini)

- Perumusan rancangan akhir; Mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Hasil akhir dari proses penyusunan Renja adalah Penetapan Perkada Renja Perangkat Daerah dimana Bappeda menyerahkan dokumen Rancangan Akhir kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai bagian dari RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023. Adapun alur penyusunan APBD sebagai tindak lanjut dari Renja adalah :



Gambar 1.1. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan RAPBD/APBD

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ;
- g. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan regional
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang tentang Tahap Perencanaan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- i. Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- j. Kepmendagri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
- k. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;
- l. Keputusan menteri kesehatan RI nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
- m. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
- n. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025 ;
- o. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 ;
- p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi, Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar no 27 tahun 2009 tentang Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024

(Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1);

- t. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar NOMOR : B-186.a/Dinkes/440/07/2019, tentang Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Polewali Mandar di tahun 2019-2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar ini adalah:

1. Sebagai acuan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan rencana kerja satu tahun kegiatan yang tertuang dalam RAPBD Tahun 2023 dan mengacu kepada urutan prioritas setiap program sesuai hasil Musrenbang Tahun 2022;
2. Sebagai Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan rencana program dan kegiatan tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten

Polewali Mandar tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Polewali Mandar

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2021. Sumber data dan informasi yang digunakan untuk menjelaskan hasil evaluasi adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk melihat capaian Renja Tahun Sebelumnya dan Laporan Monev Triwulan untuk melihat capaian kinerja tahun berjalan. Hasil Evaluasi tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun uraian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten

- Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 83%

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 82 %
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 93%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 99%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 64%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 88%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif:
 - Jumlah peserta KB aktif 29%
 - Jumlah Posbindu yang terbentuk 80%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - Jumlah Penduduk usia >60 tahun yang dilakukan skrining/pemeriksaan kesehatan sesuai standar 43%
 - Jumlah Penduduk Lansia yang dilakukan pembinaan kemandirian 40%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 93%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus 85 %
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 69%

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 43%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat :
 - Jumlah Balita Kurus 4%
 - Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (Fe) 72%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan:
 - Jumlah Desa ODF / Desa Stop Buang Air Besar Sembarang Tempat (SBS) 40%
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 98%
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan 70%
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus :
 - Jumlah peserta yang mengikuti diklat kepalangmerahan 0%
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular :
 - Jumlah Desa/ Kelurahan Bebas Jentik 87%
 - Jumlah Kasus Penemuan dan Penanganan Kasus Balita Pneumonia 25%
 - Jumlah Kasus Diare yang ditangani 49%
 - Insidens Rate Kasus Thypoid 0%
 - Prevalensi Kusta 67%
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 98%

- Jumlah kepesertaan JKN (Universal Health Coverage) Non Kapitasi 98%
 - Jumlah Kunjungan Peserta BPJS (PBI) 98%
 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0%
 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0%
 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 47%
 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 50%
 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) PSC-118 0%
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 95%
2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
- a. Penerbitan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

- Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 91%

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

a. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat :
 - Jumlah Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 1%
 - Jumlah Sekolah Dasar yang melaksanakan PHBS 97%

b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 31%

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100%
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD 100%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100%
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100%
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
 - Anggaran 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
 - Triwulanan/Semesteran SKPD 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100%
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100%
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD 100%
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja Pegawai 100%

- e. Administrasi Umum Perangkat daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100%
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 100%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 100%
 - Fasilitasi kunjungan Tamu 100%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100%
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya 100%
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100%
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100%
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan 100%
 - Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya 100%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100%
- i. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100%
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 100%
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100%

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp kewenangan daerah kabupaten

- Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 100%
- Pengembangan Puskesmas 100%
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 100%
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya 100%
- Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 100%
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 100%
- Pengadaan Obat dan Vaksin 100%
- Pengadaan Bahan Habis Pakai 100%
- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 100%

b. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

- Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kelompok Pra Konsepsi 100%
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 100%
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat :
 - Jumlah Keluarga yang menerapkan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) 100%
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga:
 - Jumlah Pos UKK yang terbentuk dan dilakukan pembinaan 100%
 - Jumlah UPK yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga 100%
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan:
 - Jumlah desa yang melaksanakan Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 100%
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 100%
 - Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
 - Jumlah pelayanan Transfusi Darah yang tersedia 100%
 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular:
 - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B 100%
 - Operasional Pelayanan Puskesmas 100%
 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 100%
- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 100%
- b. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota
 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100%
 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 100%
- 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100%
- 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Makanan Minuman
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - Jumlah Puskesmas yang melakukan pembinaan 100%
 - Jumlah Apotek dan toko obat yang dilakukan pembinaan (Sarana toko obat) 100%
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 100%
- **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan**
 - Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan.
- **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan**

Berdasarkan LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2021, metode yang digunakan untuk melakukan analisis masalah adalah Metode *Fish Bone*. Sehingga didapatkan beberapa penyebab dari tidak tercapainya target adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022

Kabupaten Polewali Mandar.

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

Lembar :

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
0 0 01 2	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
0 0 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tingkat Daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
0 0 01 2 02	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
0 0 01 2 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
0 0 01 2 07	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-	-	-
0 0 01 2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

0	0	01	2	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
0	0	01	2	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN yang di bayarkan gaji dan tunjagannya	827 Nakes	827 Nakes	827 Nakes	827 Nakes	100%	827 Nakes	827 Nakes	100%
0	0				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi	42 orang	42 orang	108	104	100%	42 orang	39 orang	92,9%
0	0	01	2	04		Jumlah tenaga kontrak daerah	102 orang	167 orang	820	818	100%	102 orang	117 orang	114,7%
0	0	01	2	06	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan analisis realisasi anggaran yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
0	0	01	2	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester an SKPD sesuai standar dan tepat waktu	12 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	-	-	-
0	0				Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
0	0	01	2	06	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
0	0	01	2		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
0	0	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	70%
0	0	01	2		Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dilakukan monev, evaluasi dan penilaian kinerja sesuai standar dan tepat waktu	100 pegawai	100 pegawai	100 pegawai	100 pegawai	100%	150 pegawai	127 pegawai	84,67%

0	0	01	2	01	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Dokumen administrasi Umum yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
0	0	01	2	03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	9 jenis	-	9 jenis	9 jenis	100%	9 Jenis	-	-
0	0	01	2	05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis alat rumah tangga yang tersedia	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%	23 Jenis	23 Jenis	100%
0	0	01	2	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	4 jenis	2 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
0	0	01	2	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%
0	0	01	2	09	Fasilitas kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100%	6 kali	6 kali	100%
0	0	01	2		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	47 LPD	5 LPD	47 LPD	47 LPD	100%	47 LPD	60 LPD	127,65%
0	0	01	2	06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
0	0	01	2	09	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	10 Peralatan	7 Peralatan	10 Peralatan	10 Peralatan	100%	10 Peralatan	3 Peralatan	30%
0	0	01	2		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terbangun	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%	1 gedung	1 gedung	100%
0	0	01	2	02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%

0	0	01	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%
0	0	01	2	02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
0	0	01	2	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dan pajak kendaraan	8	2	8	8	100%	7	7	100%
0	0	01	2	10	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	10	3	10	10	100%	10	3	30%
0	0	01	2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara		-			100%	1 Bangunan	1 Bangunan	100%
0	0	01	2	02	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang disiplin	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
0	0	01	2	10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	80 pakaian	-	80 pakaian	80 pakaian	100%	-	-	-
0	0	01	2	11	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas aparat perencana	80 pegawai	-	80 pegawai	80 pegawai	100%	-	-	-
0	0				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang menyelesaikan, pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	6 pegawai	-	6 pegawai	6 pegawai	100%	-	-	-
1	02	02			PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Sarana, Dan Prasarana Dan Upay Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%

1	02	02	2.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan UKM dan UKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	02	2.0 1	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	7 Rumah Dinas	-	2 Rumah Dinas	2 Rumah Dinas	100%	7 Rumah Dinas	-	-
1	02	02	2.0 1	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	4 Puskesmas	-	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100%	4 Puskesmas	-	-
1	02	02	2.0 1	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi (Puskesmas)	4 Puskesmas	-	4 Puskesmas	4 Puskesmas	100%	4 Puskesmas	-	-
1	02	02	2.0 1	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas, jejaring, dan jaringannya yang direhabilitasi (Puskesmas Pembantu)	1 Pustu	3 Pustu	1 Pustu	1 Pustu	100%	1 Pustu	-	-
						Jumlah gedung kantor yang terbangun	1 Gedung Kantor	-	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	100%	1 Gedung Kantor	-	-
1	02	02	2.0 1	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis pengadaan sarana prasarana	20 puskesmas 1 sarana	20 puskesmas 1 sarana	20 puskesmas 6 sarana	20 puskesmas 5 sarana	100% 83%	20 puskesmas 1 sarana	- -	- -
1	02	02	2.0 1			14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan	1 Paket	1 Paket	230 JENIS	230 JENIS	100%	1 Paket
1	02	02	2.0 1	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis item obat yang disediakan	365 JENIS	355 JENIS	365 JENIS	346 JENIS	100%	365 JENIS	-	-
						Jumlah Puskesmas yang didistribusikan obat dan perbekalan kesehatan (Puskesmas)	20 Puskesmas	20 Puskesmas	20 Puskesmas	20 Puskesmas	100%	20 Puskesmas	20 Puskesmas	100%
1	02	02	2.0 1	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	80 Jenis BMHP	-	80 Jenis BMHP	80 Jenis BMHP	100%	80 Jenis BMHP	-	-
1	02	02	2.0 1	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alkes yang dilakukan kalibrasi atau pemeliharaan	50 jenis alat	-	20 jenis alat	20 jenis alat	100%	50 Jenis alat	-	-

1	02	02	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/ Kabupaten	100%							
1	02	02	2.0 2	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	11117	756	9274	7632	82%	9264	3555	38,37%
1	02	02	2.0 2	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas kategori miskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	10612	352	8851	8239	93%	8843	-	-
1	02	02	2.0 2	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	10106	1848	8323	8267	99%	8422	4041	47,98%
1	02	02	2.0 2	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Anak Balita yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	5742	7491	56277	35781	64%	4785	17891	373,89%
1	02	02	2.0 2	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	83228	44175	60294	52922	88%	69357	52922	76,3%
1	02	02	2.0 2	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah peserta KB aktif	7510	787	301074	86401	29%	62589	-	-
						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kelompok Pra Konsepsi	20	20	20	20	100%	20	-	-
						Jumlah Posbindu yang terbentuk	167	134	167	134	80%	167	-	-
1	02	02	2.0 2	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk usia >60 tahun yang dilakukan skrining/pemeriksaan kesehatan sesuai standar	46226	557	35176	15152	43%	38522	4493	11,66%

					Jumlah Puskesmas Santun Lansia	7	5	0	8		6	8	133,33%
1	02	02	2.0 2	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	46226	7344	35133	14115	40%	38522	5294	13,74%
					Jumlah Penduduk dengan Hipertensi yang memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar	39906	11185	24964	23173	93%	33255	9755	29,33%
1	02	02	2.0 2	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	43258	6621	6664	5633	85%	36048	2347	6,51%
					Jumlah Penduduk dengan Diabetes Mellitus yang memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar								
1	02	02	2.0 2	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	162	673	957	663	69%	135	669	495,5%
					Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang diberikan pelayanan kesehatan Standar								
1	02	02	2.0 2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1171	2516	8176	3505	43%	976	20	2,04%
					Jumlah penduduk terduga TB yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar								
1	02	02	2.0 2	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	14508	-	1048	11546	100%	12090	2239	18,51%
					Jumlah penduduk berisiko terkena HIV/AIDS yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar								
1	02	02	2.0 2	14	Pengelolaan pelayanan kesehayan bagi penduduk terdampak krisisi kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (Covid-19)	167		0			167		
					Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana/berpotensi bencana memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar								
1	02	02	2.0 2	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	57424	1127	32112	1150	4%	47853	772	1,61
					Jumlah Balita Kurus								
					Jumlah Keluarga yang menerapkan Keluarga Sadar Gizi (Kadarsi)	62873	43615	50786	59840	100%	52394	59840	114,2%

						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (Fe)	11117	4370	9274	6706	72%	9264	306	3,3%
1	02	02	2.0 2	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk dan dilakukan pembinaan	20	20	20	20	100%	20	-	-
						Jumlah UPK yang melaksanakan kegiatan Kesehatan Olahraga	20	20	20	20	100%	20	-	-
1	02	02	2.0 2	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa yang melaksanakan Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	167	167	167	167	100%	167	-	-
						Jumlah Desa ODF / Desa Stop Buang Air Besar Sembarang Tempat (SBS)	68	57	167	66	40%	57	-	-
1	02	02	2.0 2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif	167	152	167	163	98%	167	167	100%
1	02	02	2.0 2	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah FKTP yang bersinergi dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional	20	20	20	20	100%	20	20	100%
1	02	02	2.0 2	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Sinyal Kewaspadaan Dini yang direspon	172	17	150	105	70%	143	-	-
1	02	02	2.0 2	24	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Calon Jemaah Haji yang diberikan Pelayanan Kesehatan	660	-	515	-	-	550	-	-
						Jumlah pelayanan Transfusi Darah yang tersedia	120	-	100	5055 pelayanan	100%	100	-	-
						Jumlah peserta yang mengikuti diklat kepalangmerahan	420	-	20	0	0%	350	-	-
1	02	02	2.0 2	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Desa/ Kelurahan Bebas Jentik	64	83	52	45	87%	53	-	-
						Insidens Rate kasus Zoonotik	0	0	0	0	0%	0,07	-	-

						Jumlah Kasus Penemuan dan Penanganan Kasus Balita Pneumonia	2530	21	963	239	25%	2108	-	-
						Jumlah Kasus Diare yang ditangani	15156	295	13756	6737	49%	12630	-	-
						Insidens Rate Kasus Thypoid	8	3	7	0	0%	7	-	-
						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B	20	20	20	20	100%	20	-	-
						Prevalensi Kusta	2	1,4	1,5	1	67%	1,5	-	-
1	02	02	2.0 2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kepesertaan JKN (Universal Health Coverage) Kapitasi	462149	-	368775	364,789	98%	385124	-	-
						Jumlah Kunjungan Peserta BPJS (PBI)	496865	-	379315	364,789	98%	414054	-	-
						Jumlah Kepesertaan JKN (Universal Health Coverage) Non Kapitasi	496865	-	368775	364,789	98%	414054	-	-
1	02	02	2.0 2	29	Penyediaan <i>Telemedicine</i> di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang tersedia layanan <i>Telemedicine</i>	20	-	0	1	-	20	-	-
1	02	02	2.0 2	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kunjungan rumah sakit wonomulyo	129600	-	0	-	-	108000	-	-
1	02	02	2.0 2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan	12	12	12	12	100%	12	-	-
1	02	02	2.0 2	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Target Pendapatan Layanan Laboratorium Kesehatan	350.000.000	-	202.000.000,00	-	-	300.000,00	-	-
1	02	02	2.0 2	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP milik pemerintah yang telah terakreditasi	20	20	20	20	100%	20	20	100%
1	02	02	2.0 2	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Desa Universal Child Immunization (UCI)	167	74	136	64	47%	167	-	-

1	02	02	2.0 2	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Desa yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani dibawah 24 jam	167	37	2	1	50%	167	-	-
1	02	02	2.0 2	38	Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) PSC-118	Jumlah Gawat Darurat yang ditangani	1	-	0	0	0%	100%	100%	100%
1	02	02	2.0 3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pelaporan berbasis manual dan elektronik yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1	02	02	2.0 3	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Aplikasi dan Pelaporan yang dikelola (SPM)	8	8	8	8	100%	8	-	-
1	02	02	2.0 3	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas yang di pantau pada aplikasi kawal ibu hamil	11117	-	8067	7632	95%	9264	-	-
1	02	02	2.0 4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Tipe D yang melaksanakan pelayanan kesehatan	100%							
1	02	02	2.0 4	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer	20	20	20	20	100%	20	20	100%
1	02	02	2.0 4	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Puskesmas yang terkoneksi dengan SISRUITE	20	17	20	20	100%	20	-	-
1	02	03			PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									

1	02	03	2.0 3		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ber STR (Tenaga Medis)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1	02	03	2.0 3	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang terlatih	20	20	20	20	100%	20	-	-
1	02	04			SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Alat Kesehatan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1	02	04	2.0 1		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat dan optikal, UMOT yang memiliki izin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1	02	04	2.0 1	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan Jumlah Apotek, dan Toko Obat yang dilakukan pembinaan (Sarana Toko Obat)	20 15 Apotek dan Toko Obat	100% 100%	20 15 Apotek dan Toko Obat	20 15 Apotek dan Toko Obat	100% 100%			
1	02	04	2.0 3		Penerbitan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga Produk Makanan dan Minuman yang memiliki izin	100%	100%	35%	30%	-	100%	-	-
1	02	04	2.0 3	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Yang mendapat pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	32	9	70	64	91%	32	-	-

1	02	04	2.0 4		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaa Makanan (TPM) antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan, Restoran, dan Depot Air Mimum (DAM)	Persentase TPM dan DAM yang memiliki izin	100%	100%	100%	0%	0%	100%	-	-
1	02	04	2.0 4	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TTU/TPM yang memenuhi syarat	871	-	55	100	-	726	-	-
1	02	05			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	62%	62%	62%	0%	0%	62%	-	-
1	02	05	2.0 2		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang telah memperoleh pelatihan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1	02	05	2.0 1	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kader kesehatan yang mendapatkan pembekalan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat	300	30	56	56	100%	56	-	-
1	02	05	2.0 2		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemantauan Rumah Tangga ber PHBS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1	02	05	2.0 2	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	62538	43615	510530	4907	1%	52115	5440	10,43%

1	02	05	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Dasar yang melaksanakan PHBS	401	149	401	388	97%	401	-	-
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan UKBM	100%	100%	100%	100%	100%	0%	-	-
1	02	05	2.0 3	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Posyandu strata Mandiri	32	30	32	10	31%	32	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Di Bidang Kesehatan kinerja pelayanan diukur dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal). IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Sedangkan SPM adalah Pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada masyarakat secara minimal. SPM sebagai Program Strategis Nasional merupakan kinerja program Kesehatan yang juga menjadi kinerja pemda.

Dinas Kesehatan kabupaten Polewali Mandar memiliki 12 indikator SPM dan 14 indikator IKU yang tertuang dalam Renstra Tahun 2019-2024 sebagai hasil kajian dari berbagai aspek, mulai dari kajian situasi kesehatan Pemerintah Daerah, kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta komitmen global di bidang kesehatan yang menjadi parameter keberhasilan pembangunan kesehatan di kabupaten Polewali Mandar. Capaian kinerja pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Kesehatan hingga tahun berjalan 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	√		8022	9264	11117	13340	7632	3555	11117	13340	Capaian belum 100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	√		8214	8843	10612	12734	8239	3974	8843	12734	Capaian belum 100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	√		8819	8422	10106	12128	8069	4041	8422	12128	
4	Pelayanan kesehatan balita	√		36504	4785	5742	6890	31181	17891	4785	6890	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	√		13173	69357	83228	99874	60358	52922	69357	99874	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	√		301704	301704	301704	301704	86401	71003	301704	301704	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	√		65949	77050	92460	110952	15152	5039	38522	46226	Capaian rendah
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	√		24964	25214	25466	25720	23173	9756	25466	25720	Capaian belum 100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	√		6664	6731	8077	9692	5633	2347	36048	43258	
10	Pelayanan kesehatan orang	√		135	135	162	194	663	69	135	162	

	dengan gangguan jiwa berat											
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	√		8176	8258	9909	11891	3505	1673	9909	11891	Capaian Rendah
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	√		11546	12090	14508	17410	4434	2501	12090	14508	Capaian Rendah
13	Angka Kematian Ibu		√	7,6	7.5	7.4	7.4	18	6	7.4	7.51	
14	Angka Kematian Bayi		√	14.2	14.5	14.8	14.8	10	8	13.9	14.2	
15	Angka Kesakitan Penyakit Menular TB		√	204	204	204	204	158	91	204	204	
16	Angka Kesakitan Penyakit Menular HIV/ AIDS		√	1	1	0	0	1.88	0,1	1	1	
17	Angka Kesakitan Penyakit Menular Kusta		√	1	1	1	1	1.39	1.5	1.5	1	
18	Angka Kesakitan Penyakit Menular Pneumonia Balita		√	4	4	3	3	5	4	5	4	
19	Angka Kesakitan Penyakit Menular Hepatitis B		√	3	2	1	1	0.7	0.1	3	3	
20	Angka Kesakitan Penyakit Menular		√	27	25	23	23	13	8	29	27	

	Diare											
21	Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Hipertensi	√	74	71	68	68	54,5	20.0 1	77	74		
22	Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Diabetes Melitus	√	16	15	14	14	11.5	4.8	14	14		
23	Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	√	2	2	1	1	1.4	1.46	2	2		
24	Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	√	306	293	280	280	431	431	319	306		
25	Prevalensi Stunting	√	20,1%	18,6%	17,1%	17,1%	23,8%	26.9%	21,6%	20,1%		
26	Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan Kesehatan	√	92.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Renja Dinas Kesehatan menyajikan capaian kinerja yang dicapai selama satu periode sebelumnya untuk selanjutnya dirumuskan permasalahan dan isu strategis yang menjadi tantangan serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan ke depan. Capaian kinerja tersebut diintegrasikan dengan sejumlah perundangan terkait, antara lain terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) selain itu juga di sinkronkan dengan sejumlah dokumen strategis lainnya, antara lain:

- i. Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024
- ii. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024
- iii. RKPD Polewali Mandar 2023

Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu OPD di Provinsi Sulawesi Barat yang senantiasa berusaha meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Pada tahun 2022, untuk mencapai target renstra telah dilaksanakan kegiatan sebanyak 4 program, 13 kegiatan, dan 54 sub kegiatan.

Berdasarkan gambaran capaian pelayanan kesehatan capaian Polewali Mandar diperoleh gambaran yang dapat dikelompokkan menjadi.

a. Pelayanan Kesehatan

1. Jumlah kematian ibu dan bayi yang masih tinggi. Jumlah Kematian Ibu untuk Tahun 2021 sebanyak 18 kasus dan kematian bayi 10 per 1000 kelahiran hidup. Untuk angka kematian Bayi disebabkan karena kasus BBLR dan Asfiksia. Berdasarkan hasil Audit Maternal Perinatal beberapa permasalahan yang menjadi penyebabnya diantaranya adalah Pemeriksaan ANC tidak adekuat, Pasien terlambat didiagnosis, Penilaian status gizi belum optimal, pengetahuan dan skill petugas mengenai tanda bahaya neonatus masih kurang, Jaminan kesehatan pasien sempat menjadi masalah untuk dirujuk di ke Rumah Sakit dan menyebabkan kekhawatiran pasien sehingga memilih pulang paksa.
2. Masih tingginya prevalensi stunting. Di polewali Mandar prevalensi stunting 23,8%. Beberapa penyebab dari masalah ini karena jumlah SDM yang terbatas (populasi besar tenaga kurang), Selain itu kurangnya partisipasi masyarakat ke posyandu juga mengakibatkan jumlah sasaran tidak tercapai.
3. Masih ada beberapa capaian SPM yang belum tercapai. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 29 % disebabkan karena keterbatasan BHP untuk screening pada usia produktif. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan pada usia lanjut 43% karena keterbatasan ketersediaan BHP untuk pemeriksaan gula darah dan Kolesterol. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 43%, Capaian rendah karena Stigma masyarakat tentang TB merasa malu jika diketahui menderita TB, adanya pandemi juga menyebabkan penderita TB masih menganggap pengambilan dahak sebagai pengambilan Spesimen Covid. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) capaian rendah 38 %

karena Screening untuk resiko HIV hanya pada Bumil dan Penderita TB. Sedangkan untuk populasi Kunci seperti penasun (Pegguna NAPZA Suntik), waria, PSK,LSL, petugas kesulitan melakukan screening

b. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

1. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di puskesmas masih rendah
2. Ketersediaan obat dan BMHP belum optimal
3. Ketersediaan Sarana Prasarana dan alat kesehatan berdasarkan standar pemenuhan masih rendah baik di Puskesmas maupun jejaringnya

c. Pengembangan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat

1. Aktualisasi PHBS oleh masyarakat masih rendah (ODF)
2. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ke posyandu.

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Kesehatan harus mampu menjawab setiap tantangan dan hambatan, mengadaptasi peluang, untuk mendukung capaian visi misi Bupati Polewali Mandar yaitu pada Misi 1 “Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius. Hambatan yang dihadapi dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah:

- Kerja sama lintas sektor dan lintas program kurang sehingga perlu adanya advokasi dan sosialisasi lintas sektor/OPD terkait program kegiatan untuk memperoleh dukungan sharing penganggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- Masih ada kendala akses yang sulit dijangkau, baik akses ke sarana kesehatan maupun akses ke lokasi lapangan
- Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan
- Masih adanya sumber daya manusia kesehatan yang kurang kompeten atau kurang professional
- Rasio sumber daya manusia kesehatan yang masih lebih kecil

dibanding jumlah penduduk yang dilayani

- Kurang maksimalnya penganggaran yang bersumber dari pendapatan daerah

Peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut:

Peluang antara lain:

1. Adanya forum Komunikasi dan tim sekretariat GERMAS di Kabupaten Polewali Mandar
2. Ketersediaan obat dan alat kesehatan di e-katalog semakin meningkat.
3. Adanya Dana Desa dan DAK yang bisa membantu dalam membiayai pelayanan kesehatan di desa
4. Pelaporan yang berbasis sistem online memudahkan dalam pengolahan data
5. Adanya sumber dana DAK Non Fisik yang bisa dimanfaatkan untuk menganggarkan program dan kegiatan prioritas

Tantangan antara lain :

1. Kurangnya koordinasi antar tim Germas
2. Proses pengadaan yang semakin tertib terhadap batasan waktu di Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
3. Tidak semua desa mampu diadvokasi untuk mengalokasikan biaya operasional kesehatan di desa
4. Beberapa wilayah kesulitan dalam akses jaringan internet karena kondisi geografis wilayah
5. Rendahnya kesadaran masyarakat ber-PHBS
6. Banyaknya aplikasi yang digunakan dalam pelaporan sulit untuk diintegrasikan
7. Tidak Semua Program dan Kegiatan bisa dianggarkan menggunakan dana DAK karena adanya Batasan menu kegiatan di Juknis

Terkait beberapa hal diatas dapat berdampak pada capaian sasaran Renstra Dinas Kesehatan untuk kualitas kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat yang berakibat pada tidak tercapainya visi misi kepala daerah untuk mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk meningkatkan capaian, upaya strategis yang perlu dilakukan adalah:

1. Pengajuan penambahan tenaga kesehatan baik berupa tenaga kontrak daerah, PNS, PTT, maupun dokter internship.
2. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan.
3. Mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
4. Mengadakan pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
5. Melakukan aksi dan advokasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan status derajat kesehatan masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program kegiatan yang ada dalam Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan disusun berdasarkan Hasil capaian kinerja berdasarkan Indikator yang ada pada Renstra Dinas Kesehatan. Proses penyusunan Rancangan Awal dilaksanakan pada bulan february 2022 dengan pagu indikatif yang sama dengan tahun sebelumnya senilai Rp. 168,874,712,994,-.kemudian dilakukan penginputan pada SIPD.

Hasil penginputan di sistem kemudian direview oleh Bappeda dimana penekanannya adalah Bagaimana Program Prioritas Daerah dan Program Prioritas SPM termuat dalam Renja Dinas Kesehatan. Berdasarkan hasil review Bappeda bahwa semua indikator SPM sudah termuat dalam Renja Dinas Kesehatan, namun ada beberapa sub kegiatan yang akan ditambahkan untuk kegiatan prioritas kabupaten. Rapat koordinasi internal juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan menghasilkan beberapa usulan dari pengelola untuk menambahkan sub kegiatan baru berdasarkan sesuai permendagri 050 tahun 2022 yang sesuai dengan indikator yang ingin dicapai. Adapun sub kegiatan yang ditambahkan pada setelah rancangan awal adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui

Pendekatan Keluarga dengan Nilai Pagu indikatif Rp. 72,667,447,-. Sub kegiatan ini tidak terdapat pada Rancangan awal namun Nomenklatur baru pada permendagri 050 Tahun 2022 ini dianggap dapat mendukung peningkatan capaian SPM sehingga dilakukan penambahan sub kegiatan pada Rancangan Renja.

2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) dengan Pagu Indikatif Rp. 10.000.000,- Sub kegiatan ini tidak terdapat pada Rancangan awal namun Nomenklatur baru pada permendagri 050 Tahun 2022 ini dianggap dapat mendukung peningkatan capaian SPM Sehingga dilakukan penambahan Sub kegiatan pada Rancangan Renja.
3. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan pagu indikatif Rp. 5.000.000,-. Sub kegiatan ini masuk dalam sub kegiatan prioritas kabupaten hasil review Bappeda mengingat pentingnya kegiatan ini untuk Sistem Pelaporan Kesehatan seperti Profil Kesehatan, Komdat SPM, dan Program Inovasi Kabupaten Aplikasi “Polman Satu Data”.
4. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan pagu indikatif Rp.18,351,047,-. Sub kegiatan ini tidak terdapat pada Rancangan awal namun Nomenklatur baru pada permendagri 050 Tahun 2022 ini dianggap dapat mendukung peningkatan capaian SPM Sehingga dilakukan penambahan sub kegiatan pada Rancangan Renja.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Polewali Mandar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

Lembar ... dari ...

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 20,444,400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 20,444,400	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas kesehatan	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	Rp 36,583,700	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas kesehatan	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	Rp 36,583,700	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas kesehatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 14,054,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas kesehatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 14,054,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	844 ASN	Rp 52,280,006,239	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	844 ASN	Rp 52,280,006,239	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,559,652,800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,559,652,800	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas kesehatan	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Rp 2,698,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas kesehatan	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Dokumen	Rp 2,698,800	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	4 Dokumen	Rp 5,250,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	4 Dokumen	Rp 5,250,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas kesehatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 4,408,400	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas kesehatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	Rp 4,408,400	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Rp 6,764,400	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Rp 6,764,400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Rp 5,168,200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	Rp 5,168,200	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas kesehatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 8,099,400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas kesehatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1 Paket	Rp 8,099,400	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 10,130,200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 10,130,200	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp 2,420,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	1 Dokumen	Rp 2,420,000	
5	Penyediaan Bahan/Material	Dinas kesehatan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp 21,890,700	Penyediaan Bahan/Material	Dinas kesehatan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp 21,890,700	

6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas kesehatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	45 Laporan	Rp 4,396,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas kesehatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	45 Laporan	Rp 4,396,000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	Rp 137,113,400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	54 Laporan	Rp 137,113,400
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas kesehatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas kesehatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	Rp 100,000,000
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dear	Dinas kesehatan				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas kesehatan			
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 205,077,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	Rp 205,077,800
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	Rp65,289,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	7 unit	Rp65,289,800
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	Rp 11,900,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	Rp 11,900,000
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Rp 12,028,600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Rp 12,028,600
15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
16	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
17	Pengembangan Puskesmas	Puskesmas Katumbangan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan Jumlah Sarana, Prasarana	1 Unit Puskesmas	Rp 7,426,482,959	Pengembangan Puskesmas	Puskesmas pekkabata	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan Jumlah Sarana, Prasarana, SDM	1 Unit Puskesmas	Rp 7,426,482,959
18	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Puskesmas pekkabata	dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	Rp 2,046,075,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Puskesmas pekkabata dan Mapilli	Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi	1 Unit	Rp 2,046,075,000
19	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Puskesmas Pekkabata	Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 Unit	Rp 856,280,700	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Puskesmas Pekkabata	Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi	2 Unit	Rp 856,280,700
20	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit Puskesmas	Rp 4,258,150,000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit Puskesmas	Rp 4,258,150,000
21	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20 Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	21 Unit Puskesmas	Rp 5,606,870,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20 Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	21 Unit Puskesmas	Rp 5,606,870,000
22	Pengadaan Obat, Vaksin	20 Puskesmas	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket (200 item obat)	3,837,435,963	Pengadaan Obat, Vaksin	20 Puskesmas	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket (200 item obat)	3,837,435,963
23	Pengadaan Bahan Habis Pakai	20 Puskesmas	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket (80 item BMHP)	5,322,295,037	Pengadaan Bahan Habis Pakai	20 Puskesmas	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket (80 item BMHP)	5,322,295,037
24	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20 Puskesmas	Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang	21 Unit Puskesmas	116,664,000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20 Puskesmas	Kesehatan/Alat Penunjang Medik	21 Unit Puskesmas	116,664,000
25	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9274 Orang	Rp 209,140,100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	9274 Orang	Rp 209,140,100

27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	Rp 259,580,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	Rp 259,580,000	
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8323 Bayi	Rp 45,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8323 Bayi	Rp 45,000,000	
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas kesehatan	jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56276 Balita	Rp 21,611,400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas kesehatan	jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56276 Balita	Rp 21,611,400	
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas kesehatan	Jumlah anak usia Pendidikan Dasar Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6294 Orang	Rp 30,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas kesehatan	Jumlah anak usia Pendidikan Dasar Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6294 Orang	Rp 30,000,000	
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas kesehatan	jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	301074 orang	Rp 95,800,200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas kesehatan	jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	301074 orang	Rp 95,800,200	
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas kesehatan	Jumlah usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	Rp 55,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas kesehatan	Jumlah usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	Rp 55,000,000	
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas kesehatan	jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24965 Orang	Rp 49,998,300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas kesehatan	jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24965 Orang	Rp 49,998,300	
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas kesehatan	jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.662 orang	Rp 50,000,700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas kesehatan	jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.662 orang	Rp 50,000,700	
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas kesehatan	jumlah penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	957 orang	Rp 40,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas kesehatan	jumlah penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	957 orang	Rp 40,000,000	
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas kesehatan	jumlah penderita orang terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8618 orang	Rp 50,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas kesehatan	jumlah penderita orang terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8618 orang	Rp 50,000,000	
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas kesehatan	jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11739 .orang	Rp 50,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas kesehatan	jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11739 .orang	Rp 50,000,000	
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen	Rp 708,504,600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen	Rp 708,504,600	
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Rp 15,000,200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Rp 15,000,200	
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Rp 162,500,100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Rp 162,500,100	
41	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Suveilans Kesehatan	5 Dokumen	Rp 29,909,400	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Suveilans Kesehatan	5 Dokumen	Rp 29,909,400	
42	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	2 Dokumen	Rp 1,300,000,000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	2 Dokumen	Rp 1,300,000,000	
43	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	8 Dokumen	Rp 179,984,800	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	8 Dokumen	Rp 179,984,800	
44	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20 Dokumen	Rp 61,636,607,969	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20 Dokumen	Rp 61,636,607,969	
45	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Rp 650,000,000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Rp 650,000,000	
46	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	20 Dokumen	Rp 15,650,566,680	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	20 Dokumen	Rp 15,650,566,680	
47	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Rp 100,000,000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Rp 100,000,000	
48	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas kesehatan	Terakreditasi di Kabupaten/Kota	20 Unit	Rp 827,769,000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas kesehatan	yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	20 Unit	Rp 827,769,000	
49	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian)	Laporan	Rp 49,359,700	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian)	Laporan	Rp 49,359,700	

50	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4 Dokumen	Rp 137,805,400	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4 Dokumen	Rp 137,805,400	
		Dinas kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinas kesehatan	Sudah Dikunjungi dan Riset tentang Masalah Kesehatan Keluarga yang Jumlah Public SafetyKeluarga	Rp 72,667,447	Nomenklatur baru permendagri 050
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas kesehatan	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam	1 Unit	Rp 40,470,600	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas kesehatan	<i>Center</i> (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi	1 Unit	Rp 40,470,600	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Dinas kesehatan	Jumlah Orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) yang mendapatkan Pelayanan	5931 Orang	Rp 10,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Dinas kesehatan	Jumlah Orang dengan masalah kesehatan jiwa	5931 Orang	Rp 10,000,000	Nomenklatur baru permendagri 050
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	Rp 40,718,300	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas kesehatan	Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	Rp 40,718,300	
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas kesehatan	Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	Rp 5,000,000	penting untuk update data informasi kesehatan
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran	20 Unit	Rp 18,351,047	Nomenklatur baru permendagri 050
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan	1 Dokumen	Rp 8,078,247	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan	1 Dokumen	Rp 8,078,247	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Dinas kesehatan				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas kesehatan				
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan	2681 Orang	30,000,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi	2681 Orang	30,000,000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan	...Orang		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	...Orang		
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN										
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas kesehatan				
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas kesehatan				
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat	36 Dokumen Apotik dan Toko Obat	Rp 20,446,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	36 Dokumen Apotik dan Toko Obat	Rp 20,446,000	
	Lanjutan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat	Dinas kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi pangan industri Rumah Tangga dan	70 Dokumen	Rp 29,974,000	Lanjutan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat	Dinas kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat	70 Dokumen	Rp 29,974,000	
	Pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					Pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas kesehatan				
	Pemeriksaan Post Market pada produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Dinas kesehatan	Jumlah Produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga yang dilakukan pemeriksaan	43 Unit sarana IRTP yang diperiksa, 45 Sampel	Rp 107,152,000	Pemeriksaan Post Market pada produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Dinas kesehatan	Jumlah Produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga yang	43 Unit sarana IRTP yang diperiksa, 45 Sampel	Rp 107,152,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KES	Dinas kesehatan				

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan Peningkatan Peran		Dinas kesehatan			
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Rp.100,104,800	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan	1 Dokumen	100,104,800
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dinas kesehatan			
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dinas kesehatan	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	52115 Keluarga	Rp 48,670,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dinas kesehatan	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dan Lingkungan	52115 Keluarga	Rp 48,670,000
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM)	Dinas kesehatan	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Rp 25,330,000	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM)	Dinas kesehatan	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Rp 25,330,000
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas kesehatan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Rp 26,000,000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas kesehatan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Rp 26,000,000
				Rp 168,874,712,994			Rp 168,970,731,488		

Hasil penetapan usulan kegiatan ditingkat kecamatan selanjutnya akan dibawa ke Forum Perangkat Daerah untuk dibahas sesuai rancangan Rencana Kerja masing-masing OPD. Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk membahas prioritas pembangunan hasil musrembang Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan menyempurnakan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 21-23 Maret 2022, jadwal dinas kesehatan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022. Dalam Forum ini dibahas mengenai 3 prioritas Kabupaten hasil murembang kecamatan kemudian diminta tanggapan teknis dari OPD yang bersangkutan. Untuk bidang kesehatan yang menjadi prioritas adalah

1. Reabilitasi Posyandu wilayah kerja puskesmas Pekkabata, tanggapan dinas kesehatan adalah Bukan wewenang Dinas kesehatan untuk Posyandu karena tidak termasuk dalam Fasilitas Kesehatan. Posyandu adalah fasilitas milik desa sehingga diharapkan adanya dukungan Dana Desa. Kecamatan Polewali adalah Prioritas Kabupaten sehingga pilihan kedua untuk bidang kesehatan yang diusul adalah Pembangunan Puskesmas Pekkabata dan tanggapan dari dinas kesehatan adalah akan diusulkan di DAK Fisik 2023. Namun Juknis dan menu DAK Fisik 2023 belum disosialisasikan sehingga belum bisa dipastikan usulan tersebut bias diakomodir atau tidak. Meskipun menunya ada tapi jika Puskesmas pekkabata bukan lokus juga akan sulit untuk kita akomodir kecuali jika Anggaran bersumber Dana DAU mencukupi.
2. Pengadaan Alkes di pustu wilayah kerja Puskesmas Pelitakan ; tanggapan Dinas Kesehatan Adalah akan diusul pada DAK FISIK 2023. Setiap tahun selalu ada menu Pengadaan ALkes pada DAK Fisik namun akan di komunikasikan kembali dengan Puskesmas terkait alkes apa yang dibutuhkan dan diharapkan alkes yang dibutuhkan tercantum dalam menu Tahun 2023

3. Pembangunan Gedung UGD Puskesmas Mapilli ; tanggapan dinas kesehatan adalah Puskesmas Mapilli baru saja mendapat lokus pada sumber dana DAK sehingga tidak memungkinkan untuk muncul lagi sebagai lokus DAK Fisik. Untuk Pembangunan Puskesmas yang menjadi prioritas kami dinas kesehatan adalah puskesmas Katumbangan dan Puskesmas Batupanga karena belum pernah menjadi lokus DAK. Namun untuk Usulan puskesmas Mapilli ini akan di dorong pada sumber Dana DAU jika ada ketersediaan dana.

Setelah Forum Perangkat Daerah kemudian dilaksanakan Musrembang Tingkat Kabupaten pada tanggal 4 April 2022. Musrembang Kabupaten ini dihadiri oleh Seluruh Perangkat Daerah, DPR dan Lintas Sektor. yang menjadi pembahasan dalam Musrembang Kabupaten ini adalah Laporan capaian kinerja kabupaten Polewali Mandar yang dipaparkan oleh Kepala Bappeda dan menetapkan Program Prioritas Kabupaten hasil murembang kecamatan dan telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah. Untuk bidang Kesehatan yang menjadi program kegiatan prioritas Tahun 2023 adalah Pembangunan Puskesmas Pekkabata, Rehabilitasi UGD Puskesmas Mapilli, dan Pengadaan Alat Kesehatan puskesmas pelitakan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Prioritas Pembangunan Kesehatan Nasional pada tahun 2020-2024 difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan Kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan masalah gizi ganda
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
5. Peningkatan Sistem Kesehatan Nasional

Sedangkan di tingkat Provinsi, strategi pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
2. Akses Masyarakat terhadap Fasilitas Kesehatan
3. Gizi Stunting pada Balita
4. Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular
5. Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS)
6. Jaminan Kesehatan
7. Akses Terhadap Sanitasi yang Layak
8. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik di tingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar dapat menyentuh sasaran yang tepat.

Mengacu pada **Visi Bupati Polewali Mandar 2019-2024** “Polewali Mandar yang Maju, Rakyat Sejahtera” dan **Misi sebagai berikut :**

1. Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius
2. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah
3. Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas yang Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern

Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar bertanggung jawab dalam pencapaian misi 1 (Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023
-1	-2	-3	-4		-5
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	7.72
			Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	14.8
			Angka Kesakitan Penyakit Menular TB	per 100000 penduduk	204
			Angka Kesakitan Penyakit Menular HIV/ AIDS	per 1000 penduduk	0
			Angka Kesakitan Penyakit Menular Kusta	per 10.000 penduduk	1
			Angka Kesakitan Penyakit Menular Pneumonia Balita	per 1000 balita	3
			Angka Kesakitan Penyakit Menular Hepatitis B	per 1000 ibu hamil	1
			Angka Kesakitan Penyakit Menular Diare	per 1000 penduduk	23
			Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Hipertensi	per 1000 penduduk	68

			Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Diabetes Melitus	per 1000 penduduk	14
			Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	per 1000 penduduk	0.1
			Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	per 1000 lansia	280
			Prevalensi Stunting	Persen	17,1%
			Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan Kesehatan	Persen	95.00%
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
			Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	persen	97.78%
			Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Predikat	Sangat Baik

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:
 1. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 memuat Visi “Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera” dengan 4 (empat) Misi. Dari misi tersebut terdapat tujuan dan sasaran

selanjutnya disusun strategi dan kebijakan pembangunan. Bidang Kesehatan dapat mendukung misi pertama yaitu “Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius” dengan tujuan Meningkatnya Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat dimana indikator dari Kualitas Sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu yang menjadi Sasaran RPJMD adalah meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup.

2. Tema dan Prioritas RKPD. Tema RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 adalah “Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif, Dan Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Untuk Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat” dengan 5 program prioritas yaitu Penguatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan, Percepatan Pengurangan Kemiskinan, Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah, Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Berwawasan Lingkungan, Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Bidang Kesehatan dapat mendukung Prioritas Pertama yaitu Penguatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
3. Pencapaian SDG's. SDGs adalah tujuan pembangunan berlanjutan yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, Bidang Kesehatan dapat mendukung tujuan ketiga yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. NSPK dan SPM. Pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dari rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah pusat sehingga. NSPK dan SPM bidang Kesehatan digunakan sebagai pedoman dalam

penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah

5. Prioritas Kemenkes. Ada 5 Program Prioritas Nasional Kementerian Kesehatan yaitu Peningkatan KIA, KB dan Kesehatan Reproduksi, Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pengendalian Penyakit, Penguatan Sistem Kesehatan dan POM, dan Penguatan Germas. Menu Kegiatan yang ditetapkan oleh Kemenkes melalui Penyaluran dana DAK 2023 juga mengacu pada Program Prioritas tersebut dimana pemerintah daerah tetap memperhatikan lokus kabupaten yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
 - Terdapat 4 Program, 15 Kegiatan, dan 72 Sub Kegiatan yang disajikan dalam tabel Renja 2023. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA; Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin

Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN; Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN; Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Lokasi program dan kegiatan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dan 20 wilayah kerja puskesmas dan jaringannya
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif tahun 2023 sebesar Rp.167,307,680,628,-

c. Rumusan program dan kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan rancangan awal namun untuk sub kegiatan dan besaran pagu ada perubahan pada rancangan akhir dengan rincian sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit dihapuskan pada rancangan akhir karena nomenklatur tersebut digunakan oleh RSUD Wonomulyo yang sebelumnya masih melekat pada Akun DPA Dinas Kesehatan tahun 2022. Telah dibuka akun tersendiri untuk RSUD Wonomulyo yang baru beroperasi 2 tahun sejak tahun 2022 Karena adanya kendala Penerbitan Izin Operasional jika tidak belum memiliki akun DPA tersendiri sehingga RSUD wonomulya Menyusun program dan kegiatannya menggunakan akun baru dengan

pagu anggaran yang dialihkan dari pagu dinas Kesehatan sebesar alokasi anggaran yang sama pada tahun 2022.

2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya. Pada rancangan awal tidak menjadi prioritas karena yang menjadi prioritas adalah rehabilitasi Puskesmas namun di minggu terakhir Juni sebelum finalisasi renja akhir diterbitkan menu DAK fisik tahun 2023, Polewali mandar bukan lokus untuk rehabilitasi puskesmas. Lokus tahun 2023 justru pada rehabilitasi pustu dimana nomenklatur sub kegiatannya ada pada Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan lainnya.
3. Untuk Dak Non fisik menu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting sudah tidak melekat di Dinas Kesehatan melainkan pada Dinas KB dan Pemberdayaan Perempuan dengan dasar pertimbangan bahwa Penanganan Stunting diarahkan pada pendekatan keluarga. alokasi anggaran untuk stunting yang bersumber dana DAK Non Fisik sudah tidak ada sehingga dari Bappeda menambahkan pagu anggaran untuk DAU yang dialokasikan untuk penanganan Stunting.
4. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) pagu awal Rp. 49 juta sama dengan pagu Tahun 2022 namun karena indikator dari Sub kegiatan ini adalah pengelolaan PSC terintegrasi yang merupakan Mandatory dari pusat sehingga ada tambahan alokasi anggaran PSC yang baru saja beroperasi tahun 2022 untuk pemenuhan kebutuhan tenaga dan operasional PSC menjadi Rp. 140,670,650.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				165,454,033,292			167,307,680,628	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun			55,421,149,593			56,559,005,039	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor Persentase tertib keuangan perangkat daerah			71,082,000			71,082,100	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	4 Dokumen	20,444,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen 97.78 Persen 100 Persen 100 Persen 90 Persen 80 Persen 90 Persen	20,444,400	

												97.78 Persen	
1	0 2	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	3 Dokumen	36,583,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 97.78 Persen 100 Persen 100 Persen 90 Persen 80 Persen 90 Persen 97.78 Persen	36,583,700
1	0 2	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	3 Laporan	14,054,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 97.78 Persen 100 Persen 100 Persen 90 Persen 80 Persen 90 Persen 97.78 Persen	14,054,000
1	0 2	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor Persentase tertib keuangan perangkat daerah			54,740,626,642				55,847,607,839
1	0 2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	844 Orang/bu	51,041,047,742	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 97.78 Persen 100 Persen 100 Persen 90 Persen 80 Persen 90 Persen 97.78 Persen	52,280,006,239

1	0 2	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	1 Dokumen	3,691,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen 97.78 Persen 100 Persen 100 Persen 90 Persen 80 Persen 90 Persen 90 Persen 97.78 Persen	3,559,652,800
1	0 2	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	1 Laporan	2,798,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen 97.78 Persen 100 Persen 100 Persen 90 Persen 80 Persen 90 Persen 90 Persen 97.78 Persen	2,698,800
1	0 2	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	4 Laporan	5,250,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen 97.78 Persen 100 Persen 100 Persen 90 Persen 80 Persen 90 Persen 90 Persen 97.78 Persen	5,250,000
1	0 2	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor Persentase tertib keuangan perangkat daerah			4,408,200			4,408,400
1	0 2	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	1 Laporan	4,408,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen 97.78 Persen 100 Persen 100 Persen 90 Persen 80	4,408,400

												Persen 90 Persen 97.78 Persen	
1	0 2	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	45 Laporan	4,396,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 97.78 Persen 100 Persen 100 Persen 90 Persen 80 Persen 90 Persen 97.78 Persen	4,396,000
1	0 2	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	54 Laporan	138,158,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 97.78 Persen 100 Persen 100 Persen 90 Persen 80 Persen 90 Persen 97.78 Persen	137,113,400
1	0 2	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor Persentase tertib keuangan perangkat daerah			207,190,951				205,077,800
1	0 2	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	12 Laporan	207,190,951	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 97.78 Persen 100 Persen 100 Persen 90 Persen 80 Persen 90 Persen 97.78 Persen	205,077,800

1	0 2	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor Persentase tertib keuangan perangkat daerah			103,527,600			89,218,400
1	0 2	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	7 Unit	78,949,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen 97.78 Persen 100 Persen 100 Persen 90 Persen 80 Persen 90 Persen 97.78 Persen	65,289,800
1	0 2	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	27 Unit	11,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen 97.78 Persen 100 Persen 100 Persen 90 Persen 80 Persen 90 Persen 97.78 Persen	11,900,000
1	0 2	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	1 Unit	12,618,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen 97.78 Persen 100 Persen 100 Persen 90 Persen 80 Persen 90 Persen 97.78 Persen	12,028,600
1	0 2	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				109,329,757,299			110,368,150,789
1	0 2	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				28,277,132,177			28,319,008,194

1	0 2	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo	1 Unit	4,015,095,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	4,015,095,200
1	0 2	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Mapili	3 Unit	2,532,280,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	2,532,280,100
1	0 2	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	1 Unit	782,600,000	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	782,600,000

1	0 2	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma	2 Unit	817,727,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	817,727,900
1	0 2	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Batulaya Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Tutar, Taramanu Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Matangnga Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Pambusuang Kab. Polewali Mandar, Matakali, Pasiang	6 Unit Puskesmas	4,338,516,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	4,338,516,000

1	0 2	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	20 Unit Puskesmas	6,349,338,594	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	6,349,338,594
1	0 2	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	20 Paket	4,044,491,363	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	4,044,491,363
1	0 2	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	1 Paket	5,322,385,520	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	5,322,295,037

1	0 2	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	20 Unit Puskesmas	74,697,500	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	116,664,000
1	0 2	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				80,915,892,622			81,809,425,096
1	0 2	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	9274 Orang	266,439,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	366,028,000
1	0 2	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	450 Orang	241,387,300	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	259,580,000

1	0 2	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	8323 Orang	44,999,700	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	45,000,000
1	0 2	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	56276 Orang	21,611,400	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	21,611,400
1	0 2	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	6294 Orang	29,999,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	30,000,000

1	0 2	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	301074 Oran	95,799,900	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	95,800,200
1	0 2	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	35169 Orang	56,505,800	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	0
1	0 2	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	24965 Orang	50,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	49,998,300

1	0 2	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	6662 Orang	49,999,700	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	50,000,700
1	0 2	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	957 Orang	38,369,700	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	40,000,000
1	0 2	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	8618 Orang	49,999,700	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	50,000,000

1	0 2	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	0 Orang	49,999,700	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	50,000,000
1	0 2	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	24 Dokumen	858,634,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	858,634,600
1	0 2	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	1 Dokumen	15,000,200	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	15,000,200

1	0 2	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	1 Dokumen	162,522,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	162,522,200
---	--------	----	------	----	--	---	---	-----------	-------------	--	--	-------------

1	0 2	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	5 Dokumen	49,999,900	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	29,909,400
---	--------	----	------	----	----------------------------------	---	--	-----------	------------	---	--	------------

1	0 2	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	5931 Orang	11,629,700	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	10,000,000
1	0 2	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	2 Dokumen	1,300,000,000	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	1,300,000,000
1	0 2	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	8 Dokumen	179,917,700	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	179,984,800

1	0 2	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	20 Dokumen	60,528,537,072	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	61,236,607,969
1	0 2	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	20 Dokumen	15,483,448,200	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	15,650,566,680
1	0 2	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	100,000,000

1	0 2	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	20 Unit	827,767,200	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	827,769,000
1	0 2	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	1 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	49,359,700
1	0 2	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	4 Dokumen	67,804,900	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	137,805,400

1	0 2	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	1 Unit	140,670,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	40,670,600
1	0 2	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	50 Keluarga	94,849,100	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	72,667,447
1	0 2	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				136,732,500			151,312,500

1	0 2	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali	1 Dokumen	14,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	14,580,000
---	--------	----	------	----	--	---	--	-----------	------------	--------------------------------------	--	------------

1	0 2	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	3 Dokumen	122,152,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	87 Persen 6 Persen 0 Persen 68 Persen 5 Persen 27 Persen 100 Persen 72 Persen 58 Persen 100 Persen 100 Persen 38 Persen	136,732,500
1	0 2	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				18,441,000			130,000,000
1	0 2	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				5,591,000			30,000,000
1	0 2	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	2651 Orang	5,591,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	30,000,000
1	0 2	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12,850,000			100,000,000
1	0 2	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	25 Orang	12,850,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	100 Persen 100 Persen	100,000,000
1	0 2	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				407,186,900			50,420,000

1	0 2	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				20,466,000		20,446,000		
1	0 2	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	36 Dokumen	20,466,000	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	668 Persen 310 Persen 50 Persen 50 Persen 80 Persen	20,446,000
1	0 2	04	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				386,720,900		29,974,000		
1	0 2	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	70 Dokumen	386,720,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	668 Persen 310 Persen 50 Persen 50 Persen 80 Persen	29,974,000
1	0 2	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				277,498,500		200,104,800		
1	0 2	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				177,500,600		74,670,000		
1	0 2	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	1 Dokumen	77,500,200	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	62 Persen	26,000,000

1	0 2	05	2.02	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	52115 Keluar	100,000,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	62 Persen	48,670,000
1	0 2	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				99,997,900			25,330,000
1	0 2	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora	1 Dokumen	99,997,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	62 Persen	25,330,000
TOTAL									165,454,033,292			167,307,680,628

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan yang perlu mendapat perhatian

1. Bagaimana upaya pencapaian target SPM terutama 4 yang rendah
2. Perlunya peningkatan kesehatan ibu dan anak
3. Penanggulangan penyakit menular

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar berkewajiban mengimplementasi pencapaian tujuan sasaran program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar berkewajiban menyusun RKA yang berpedoman pada Renja dan RKPD
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Optimalisasi pelaksanaan Renja perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan
2. Memperhatikan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sehingga kegiatan yang tidak mempunyai daya ungkit terhadap pencapaian visi misi kepala daerah dipertimbangkan pelaksanaannya pada tahun berikutnya

Bahwa dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini diharapkan mendapat dukung dari berbagai pihak terutama Legeslatif dalam hal penganggaran dan Masyarakat dalam hal pelaksanaan dan Pemanfaatannya serta dari pihak lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan.

Pembangunan di lapangan. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2022 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan setinggi-tinggi bagi masyarakat Polewali Mandar.

Polewali, Juli 2022
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Polewali Mandar



H.M. Suaib Nawawi, SKM, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630927 202202 2 001